



Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu, sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Bupati Sintang Nomor: 050/0105/Set-BAPPEDA tanggal 15 Januari 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Sintang Tahun 2020.

Sebagaimana diketahui Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, yang pada tahun 2021 menetapkan tema pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

"Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sumberdaya Manusia dan Ekonomi Kerakyatan didukung Keterbukaan Pemerintah Menuju Sintang Yang Berkelanjutan "

Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja ini), untuk itu saran yang konstruktif sangat diperlukan guna penyempurnaan materi Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan kKabupaten Sintang di masa mendatang.

Sintang, Mei 2020 KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

> Henri, S.Sos., M.M Pembina Utama Muda NIP. 19610818 198203 1 014

> > Halaman: <u>i</u>



Daftar Isi

				Hal
KAT	A PE	NG	ANTAR	i
DAF 7	ΓAR	ISI		ii
DAF1	ΓAR	TAI	BEL	iii
BAB	T	:	PENDAHULUAN	_
			1.1. Latar Belakang	1
			1.2. Landasan Hukum	2
			1.3. Maksud dan Tujuan	2
			1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB	ΤΤ		EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN	
		•	LALU	
			2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
			2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	40
			2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	53
			2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	61
			2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	71
BAB	III	:	TUJUAN DAN SASARAN	
			3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	75
			3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	75
			3.3. Program dan Kegiatan	80
BAB	IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	87
BAB	V	:	PENUTUP	102



Daftar Tabel

		Hal
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kabupaten Sintang dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017 Penataan Ruang Dan Pertanahan Pencapain Kinerja Pelayanan Dokumen Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang	18
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	45
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	63
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sintang	73
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	81
Tabel BB.36	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	88



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021, merupakan salah satu tahapan awal proses pelaksanaan Pembangunan Bidang Penataan Ruang, Pertanahan dan Data Pengawasan dan Pengendalian yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing SKPD secara terpadu dan sistematis. sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang kemudian menjadi DPA-SKPD.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.



1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
- c. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.
- d. Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026.
- e. Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
- f. Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
- g. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor: 050/0105/Set-BAPPEDA tanggal 15
 Januari 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang
 Kabupaten Sintang Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan Program dan Kegiatan) selama satu tahun 2021. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 adalah Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun



anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2017- 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

2) Tujuan

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
- c. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada Sub Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (



tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

Berisikan uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.



BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

1.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

1.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rumusan Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah adalah Rencana kerja dan pendanaan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang untuk Tahun Anggaran 2021

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu (tahun 2019) dan prakiraan capaian berjalan (tahun 2020), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang telah disahkan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Pada Tahun 2019, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang memiliki Anggaran sebesar **Rp. 11.773.190.333** (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) Pagu Anggaran Setelah Perubahan terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.** 3.518.014.632,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 8.255.175.701,00** (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) dengan 12 program dan 49 kegiatan.

Berdasarkan laporan akuntabilitas dapat diuraikan analisa kinerja pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan beberapa kegiatan pelayanan yang mendukung pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.



Penyediaan jasa surat menyurat tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Jumlah materai 3.000 sebanyak 30 lembar
- > Jumlah materai 6.000 sebanyak 165 lembar

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 64,38 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- > Telepon sebanyak 12 bulan
- Listrik sebanyak 12 bulan
- > Internet sebanyak 12 bulan
- > TV kabel sebanyak 12 bulan

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional tercapai 79,55 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- > STNK Mobil + Pajak sebanyak 3 unit
- > STNK Motor + Pajak sebanyak 8 unit

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Jumlah Peralatan kebersihan dan Bahan kebersihan sebanyak 15 item

e. Penyediaan ATK.

Penyediaan ATK tercapai 99,94 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- ➤ Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 31 jenis.
- > Tersedianya Perlengkapan Alat Tulis kantor sebanyak 4 jenis

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :



- > Tersedianya barang cetakan sebanyak 6 jenis.
- > Terlaksananya penggandaan sebanyak 18.866 lembar dokumen.
- > Terlaksananya Penjilidan sebanyak 35 Buku

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Terlaksananya pengadaan alat listrik sebanyak 11 jenis.

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tercapai 81,48 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Tersedianya surat kabar sebanyak 4 media massa.

i. Penyediaan Makanan dan Minuman.

Penyediaan makanan dan minuman tercapai 99,94 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Tersedianya nasi kotak sebanyak 399 kotak
- Tersedianya snack sebanyak 399 kotak

j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tercapai 99,13 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- > Rapat keluar Kabupaten sebanyak 18 Kali
- Rapat keluar Provinsi sebanyak 13 Kali

k. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran.

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran tercapai 98,48 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- > Jasa kebersihan kantor sebanyak 1 orang.
- Jasa administrasi kantor sebanyak 19 orang

l. Pembinaan ke Dalam Daerah.



Pembinaan ke dalam daerah tercapai 99,33 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pada 14 (empat belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Tebelian, Kelam Permai, Sepauk, Tempunak, Nanga Mau, Nanga Tebidah, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Binjai, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Serawai dan Kecamatan Kemangai.

m. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) tercapai 48,36 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Tersedianya BBM non subsidi (pertamax), BBM subsidi (mesin rumput), BBM Non subsidi (solar) sesuai kebutuhan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor

Pembangunan Gedung Kantor tercapai 99,90 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Tersedianya ruang kerja gedung kantor di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan sebanyak 1 Paket

b. Pengadaan Meubeleur

Pengadaan Meubeleur tercapai 99,77 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Terlaksananya Pengadaan Meubeleur sebanyak 25 unit.

c. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer

Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer tercapai 96,63 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Terlaksananya Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer sebanyak 15 unit.



d. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tercapai 99,85 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Tersedianya AC yang dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana gedung kantor sebanyak 2 unit.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional tercapai 99,95 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

➤ Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 secara rutin/berkala untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana sebanyak 3 unit.

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana sebanyak 7 Unit.

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Printer.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Printer tercapai 88,80 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- > Terpeliharanya Laptop sebanyak 2 Unit
- > Terpeliharanya Komputer sebanyak 2 Unit
- > Terpeliharanya Printer sebanyak 4 Unit.

h. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana sebanyak 1 Paket.

i. Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik



Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik sebanyak
 1 Paket.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu tercapai 98,92 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga yang dapat menunjang sarana dan prasarana sebanyak 57 Stel.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan Pelatihan 98,37 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah:

➤ Jumlah PNS yang mengikuti Diklat/Bimtek sebanyak 7 orang.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sebanyak 1 Dokumen.

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan sebanyak 1 Dokumen.

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun



Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun tercapai 99,99 %, dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

➤ Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan sebanyak 1 Dokumen.

d. Penyusunan LAKIP

Penyusunan LAKIP tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

➤ Tersusunnya laporan LAKIP yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sebanyak 1 Dokumen.

6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

a. Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan

Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan tercapai 54,25 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Terlaksananya Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan sebanyak sebanyak 8 Objek.

b. Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang

Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang tercapai 57,82 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Tersedianya Tanah yang Diganti Rugi untuk Pembangunan sebanyak 8 Sertifikat

c. Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab Sintang

Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab Sintang tercapai 95,94 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Terlaksananya Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab Sintang sebanyak 120 Patok.

d. Pelayanan Penerbitan Izin Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah



Pelayanan Penerbitan Izin Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tercapai 98,14 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Terlaksananya Pemberian Izin Lokasi Perkebunan dan Pemanfaatan Tanah sebanyak 10 Peta.

7. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

a. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan tercapai 97,74 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Terselesaikannya permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat sebanyak 5 kasus.

8. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

a. Pemetaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pemetaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tercapai 98,63 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Jumlah Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kecamatan Dedai sebanyak 31 Peta.

9. Program Perencanaan Tata Ruang

a. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang tercapai 99,87 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Tersusunnya Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang sebanyak 1 Dokumen.

b. Koordinasi Bidang Penataan Ruang

Koordinasi Bidang Penataan Ruang tercapai 98,67 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Serasinya perencanaan penataan ruang kabupaten, provinsi dan Pusat.

c. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi Kota Kecamatan Kelam Permai



Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi Kota Kecamatan Kelam Permai tercapai 99,46 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

➤ Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi Kota Kecamatan Kelam Permai sebanyak 1 Dokumen.

d. Optimaliasai/Penambahan Menu Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Pada SIMTARU

Optimaliasai/Penambahan Menu Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Pada SIMTARU tercapai 96,20 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Terlaksananya Kegiatan Optimaliasai/Penambahan Menu Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Pada SIMTARU sebanyak 1 Dokumen Pelayanan.

e. Revisi Dokumen Teknis dan Fasilitasi Perda RDTR Kota Sintang

Revisi Dokumen Teknis dan Fasilitasi Perda RDTR Kota Sintang tercapai 97,22 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Dokumen RDTR Kawasan Kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan dan rujukan pemberian izin

f. Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kota Sintang

Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kota Sintang tercapai 98,44 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Dokumen KLHS RDTR Kawasan Kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan dan rujukan pemberian perizinan.

10. Program Pemanfaatan Ruang

a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang tercapai 99,07 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penataan ruang sebanyak 1 Dokumen.

b. Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak

Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak tercapai 96,74 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :



> Tersusunnya laporan pelayanan persetujuan siteplan/rencana tapak sebanyak 1 Dokumen.

c. Penunjang Pelayananan Advice Planing/SKRK

Penunjang Pelayananan Advice Planing/SKRK tercapai 96,89 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

> Tersusunnya Surat Rekomendasi dan Informasi Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Lokasi Tertentu yang menggambarkan informasi pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis lainnya sebanyak 1 Dokumen.

11. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang tercapai 99,97 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Tersusunnya Dokumen pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang sebanyak 1 Dokumen.

Penyusunan Sistem Informasi Menejemen (SIM) Pengawasan Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan Berbasis Database

Penyusunan Sistem Informasi Menejemen (SIM) Pengawasan Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan Berbasis Database tercapai 97,01 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

tersedianya SIM Pengawasan dan Pengendalian Berbasis Data Base sebanyak 1 Paket

c. Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah

Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah tercapai 96,16 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

Tersusunnya Dokumen evaluasi pengawasan dan Pengendalian
 Pemanfaatan Ruang dan Tanah sebanyak 1 Dokumen

g. Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah



Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah Tanah tercapai 99,85 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah sebanyak 1 Dokumen

12. Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah

a. Pameran Pembangunan.

Pameran pembangunan tercapai 74,47 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

• Terlaksananya pawai pembangunan untuk 1 kali kegiatan.

b. Peringatan Hari Besar Nasional

Peringatan Hari Besar Nasional tercapai 93,83% dengan indikator pencapaian sasaran

adalah:

- Tersedianya Barang sebanyak 6 Jenis
- Tersedianya Spanduk sebanyak 120 Meter
- Tersedianya Umbu-umbul sebanyak 11 Buah
- 3. Keberhasilan capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
 - Payung hukum bagi operasionalisasi pelayanan publik bidang Penataan Ruang dan Pertanahan telah tersedia tidak hanya di tingkat kabupaten, namun juga di tingkat provinsi dan pusat.
 - Tersedianya sumber daya manusia yang telah mengikuti bimbingan teknis pelayanan Penataan Ruang dan Pertanahan, meskipun secara kuantitas masih belum memadai.
 - Terlaksananya penambahan sarana dan prasarana, khususnya sarana pelayanan langsung, meskipun secara kuantitas belum memadai.
 - Terlaksananya penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.



- · Secara umum, hubungan kerjasama antara Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dengan satuan kerja lain baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat boleh dikatakan cukup baik;
- Dukungan dari unsur pimpinan daerah, terhadap aktifitas Dinas Penataan
 Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang;
 Antusiasme sebagian besar masyarakat terhadap layanan Penataan Ruang dan Pertanahan yang digelar oleh
 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 4. Belum berhasilnya pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
 - 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.;
 - 2) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan;
 - 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - 4) Belum teralokasikannya anggaran untuk pelaksanaan beberapa kegiatan;
 - 5) Ada kegiatan pengadaan ganti rugi tanah yang tidak terlaksana karena belum ada kesepakatan dengan pemilik tanah dari hasil penilaian Apreasil;

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017 (Tahun Berjalan) dapat dilihat pada tabel T – C 29 sebagai berikut :



Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-2) 2019		ealisasi Kinerja Itan Tahun Lalu		Target dan Program Kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-1) 2020	Realisasi Renja PD tahun (n-1) 2020	Tingkat Realisasi (%)	(Renja PD tahun n-0) 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n- 0) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Wajib Urusan Pertanahan									
'0204.01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0204.020401.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Output : Jumlah materai Rp.3.000 Jumlah materai Rp.6.000	225 lembar 50 lembar	225 lembar 50 lembar	30 lembar 165lembar	30 lembar 165 lembar	100 %	30 lembar 165 lembar	-	99,91 %
		Outcomes : Tersedianya materai 6.000 dan 3.000								
0204.020401.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output: Jumlah pemakaian telephone Jumlah pemakaian listrik Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian internet	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	86,14 %	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	-	77,98 %



		Т		1	1	1		1	I	
		<u>Outcomes :</u> Tersedianya jasa internet, air dan listrik								
0204.020401.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Output: Jumlah kendaraan roda 2 Jumlah kendaraan roda 4	8 unit 3 unit	8 unit 3 unit	8 unit 3 unit	8 unit 3 unit	74,75 %	8 unit 3 unit	-	75,89 %
		Outcomes: Tersedianya surat-surat kendaraan dinas/oprasional yg dpt menunjang pelayanan administrasi perkantoran								
0204.020401.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output : Jumlah buku cek yang disediakan	4 buah	4 buah	4 buah	10 buah	74,64 %	10 buah		74,64 %
		Outcomes: Tersedianya buku cek selama 1 tahun yg dpt menunjang pelayanan administrasi perkantoran								
0204.020401.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	17 jenis	17 jenis	15 jenis	15 jenis	100 %	jenis	-	99,79 %
		Outcomes: Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang dapat Menunjang Pelayanan Adminstrasi Perkantoran								
0204.020401.01.010	Penyediaan ATK	<u>Output :</u> Jumlah ATK	30 jenis	30 jenis	31 jenis	31 jenis		31 jenis	-	99,86 %



		Jumlah Perlengkapan yang disediakan			4 Jenis	4 Jenis	99,75 %	4 Jenis		
		Outcomes : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor yang dapat Menunjang Pelayanan Administrasi perkantoran								
0204.020401.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output: Jumlah barang cetakan Jumlah photo copy Jumlah Penjilidan Outcomes: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dapat menunjang administrasi perkantoran	7 Jenis 20.000 lembar 30 Buku	7 Jenis 20.000 lembar 30 Buku	6 Jenis 18.866 lembar 35 buku	6 Jenis 18.866 lembar 35 buku	100 %	6 Jenis 18.866 Iembar 35 buku	-	100 %
0204.020401.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output: Jumlah Peralatan Listrik yang Tersedia Outcomes: Tersedianya Peralatan Listrik dan Elektronik yang dapat	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100 %	12 jenis	-	100 %
		Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0204.020401.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah Surat Kabar/Majalah	2 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	61,11 %	4 jenis	-	65,43 %
		Outcomes : Terpenuhinya Surat Kabar yang dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran								



0204.020401.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	<u>Output :</u> Jumlah nasi kotak Jumlah snack	330 kotak 330 kotak	330 kotak 330 kotak	399 kotak 399 kotak	399 kotak 399 kotak	99,90 %	399 kotak 399 kotak	-	98,98 %
		Outcomes: Terpenuhinya Makan dan Minuman yang dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0204.020401.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Output: Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsulatsi ke Luar Kabupaten Jumlah Rapat Koordiansi dan	14 Kali	14 Kali	18 Kali	18 Kali	99,55 %	32 Kali	-	99,53 %
		Konsulatasi ke Luar Provinsi Outcomes : Meningkatnya Koordinasi dan Konsulatsi yang dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantorran dan Tupoksi Dis.PRP	8 Kali	8 Kali	13 Kali	13 Kali		11 Kali		
0204.020401.01.020	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Output: Gaji Tenaga Honorer Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan S1 D3 SMA Outcomes: Tersedianya Tenaga Pendukung	9 Orang 10 Orang	9 Orang 10 Orang	9 Orang 1 Orang 10 Orang	9 Orang 1 Orang 10 Orang	98,75 %	10 Orang 1 Orang 9 Orang	-	98,28 %
0204.020401.01.019	Kegiatan Pembinaan Kedalam Daerah	Administrasi/Teknis Perkantoran Output: Jumlah Pembinaan ke dalam Daerah	69 Kali	69 Kali	69 Kali	69 Kali	99,53 %	80 Kali	-	99,54 %



		Outcomes : Meningkatnya Informasi Penataan Ruang dan Pertanahan bagi Masyarakat								
0204.020401.01.021	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Output : Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas yang dibutuhkan	1.256 Liter	1.256 Liter	1.968 liter	562 Liter	81,98 %	1.224 liter	-	77,01 %
		Outcomes : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat								
'0204.02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
0204.020401.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output: Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	2 unit	2 unit	97,33 %	1 unit	-	97,33 %
		Outcomes: Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Tupoksi DPRP								
0204.020401.02.010	Pengadaan Mebeleur	Output: Terpenuhi Mebeleur	40 unit	40 unit	21 unit	21 unit	100 %	6 unit	-	98,27 %
		Outcomes : Terpenuhinya meja kursi kantor untuk menujang peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
0204.020401.02.011	Pengadaan perangkat komputer	Output:								



	dan printer	Jumlah komputer Jumlah printer	4 unit 8 unit	4 unit 8 unit	2 unit 3 unit	2 unit 3 unit	99,79 %	3 unit 2 unit	-	99,79 %
		Outcomes: Tersedianya perangkat komputer dan printer untuk menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Tupoksi DPRP								
0204.020401.02.012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Jumlah AC yang tersedia	2 unit	2 unit	-	-	-	-	-	99,85 %
		Outcomes: Tersedianya AC yang dapat m Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana aparatur								
0204.020401.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	Output : Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara	2 unit	2 unit	2 Unit	2 Unit	99,98 %	7 Unit	-	99,91 %
		Outcomes: Terpenuhinya Pemeliharaan kendaraan roda 4 secara rutin/berkala untuk menunjang peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana aparatur								
0204.020401.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output : Jumlah AC yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	7 Unit	7 Unit	100 %	7 Unit	-	93,53 %
		Outcomes : Terpenuhinya Pemeliharaan								



		Peralatan Gedung Kantor secara Rutin/berkala untuk Menunjang Peningkatan Sarana dan Prasarana								
0204.020401.02.030	Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Komputer dan Printer	Output: Jumlah Laptop yang dipelihara Jumlah Komputer yang dipelihara Jumlah Printer yang dipelihara	2 unit 2 unit 4 unit	2 unit 2 unit 4 unit	2 unit 2 unit 4 unit	2 unit 1 unit 4 unit	99,50 %	2 unit 2 unit	-	94,3 %
		<u>Outcomes :</u> Tersediannya Peralatan yang dapat Menunjang Tugas Aparatur								
0204.020401.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Output: Jumlah ruang Pelayanan Advice Planning Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	1 ruang	1 ruang	-	-	-	-	-	100 %
		Outcomes: Tersediannya ruang Pelayanan Advice Planning Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang								
0204.020401.02.050	Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik	Output: Jumlah Peralatan Studio Visual Outcomes: Tersediannya Peralatan Studio	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	100 %
		Visual								



1.05.1.05.01.02.064	Pengadaan Alat Ukur	Output : Tersedianya Alat Ukur	3 Base, 3 Controller, 5 Rover	3 Base, 3 Controller, 5 Rover	-	-	-	-	-	97,75 %
		<u>Outcomes :</u> Meningkat SDM								
0204.03	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
0204.020401.03.005	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Output: Jumlah Pakaian Dinas Lapangan Outcomes: Tersedianya Pakaian Dinas yang dapat Menunjang Sarana dan Prasarana Aparatur	57 Stel	57 Stel	-	-	-	-	-	99,46 %
		гтазагана Арагасиі								
0204.05	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
0204.020401.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output: Jumlah PNS yang mengikuti DIKLAT Outcomes: Meningkatnya kemampuan PNS yang mengikuti DIKLAT yang	8 Orang	8 Orang	-	-	-	-	-	89,62 %
		dapat menunjang tugas								
0103.06	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja									



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Output: Jumlah Laporan Tahunan Outcomes: Tersusunnya Laporan Capian Kinerrja dan Ikhtisar Realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	100 %
	Tersusunnya Laporan Capian Kinerrja dan Ikhtisar Realisasi								
	Kinerja SKPD								
enyusunan Pelaporan euangan Semesteran	Output: Jumlah Laporan Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	100 %
	Outcomes : Tersusunya Laporan Semester yang memuat Data dan Informasi Capaiaan Kinerja dan Keuangan								
enyusunan LAKIP	<u>Output :</u> Jumlah laporan LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	100 %
	Outcomes : Tersusunya LAKIP yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan OPD								
enyusunan Pelaporan euangan Akhir Tahun	Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	99,99 %
	Outcomes: Tersusunnya Laporan Akhir Tahun yang Memuat Data dan Informasi Capaian Kinerja dan Keuangan								
er	nyusunan LAKIP nyusunan Pelaporan	Outcomes: Tersusunya Laporan Semester yang memuat Data dan Informasi Capaiaan Kinerja dan Keuangan Output: Jumlah laporan LAKIP Outcomes: Tersusunya LAKIP yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan OPD Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Outcomes: Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun Outcomes: Tersusunya Laporan Akhir Tahun Outcomes: Tersusunnya Laporan Akhir Tahun yang Memuat Data dan Informasi Capaian Kinerja dan	Outcomes: Tersusunya Laporan Semester yang memuat Data dan Informasi Capaiaan Kinerja dan Keuangan Output: Jumlah laporan LAKIP Outcomes: Tersusunya LAKIP yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan OPD Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Outcomes: Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun Outcomes: Tersusunya Laporan Akhir Tahun Outcomes: Tersusunnya Laporan Akhir Tahun yang Memuat Data dan Informasi Capaian Kinerja dan	Qutcomes : Tersusunya Laporan Semester yang memuat Data dan Informasi Capaiaan Kinerja dan Keuangan Nyusunan LAKIP 1 Dokumen Qutcomes : Tersusunya LAKIP yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan OPD Nyusunan Pelaporan Jangan Akhir Tahun Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen Outcomes : Tersusunnya Laporan Akhir Tahun yang Memuat Data dan Informasi Capaian Kinerja dan	Qutcomes : Tersusunya Laporan Semester yang memuat Data dan Informasi Capaiaan Kinerja dan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Output :	Outcomes: Tersusunya Laporan Semester yang memuat Data dan Informasi Capaiaan Kinerja dan Keuangan Output: Jumlah laporan LAKIP Outcomes: Tersusunya LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Outcomes: Tersusunya LAKIP yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan OPD Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Outcomes: Tersusunnya Laporan Akhir Tahun yang Memuat Data dan Informasi Capaian Kinerja dan	Outcomes: Tersusunya Laporan Semester yang memuat Data dan Informasi Capaiaan Kinerja dan Keuangan Output: Jumlah laporan LAKIP 1 Dokumen 1 Dokumen	Outcomes: Tersusunya Laporan Semester yang memuat Data dan Informasi Capaiaan Kinerja dan Keuangan Output: Jumlah laporan LAKIP Outcomes: Tersusunya LAKIP yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan OPD Outcomes: Tersusunya LAKIP yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan OPD Output: Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Output: Tahun Outcomes: Tersusunya Laporan Akhir Tahun yang Memuat Data dan Informasi Capaian Kinerja dan	Outcomes: Tersusunya Laporan Semester yang memuat Data dan Informasi Capaiaan Kinerja dan Keuangan 1 Dokumen 1 Doku



0103.31	6. Program Perencanaan Tata Ruang									
0103.020401.31.001	Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang	Output: Jumlah Laporan Penunjang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	98,97 %
		Outcomes: Terlaksananya Kegiatan Penunjang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)								
0103.020401.31.016	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang	Output: Laporan Hasil Koordinasi Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,59 %	21 Kali	-	98,83 %
		Outcomes: Serasinya perencanaan penataan ruang kabupaten, provinsi dan pusat						92 kali		
0103.020401.31.067	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi Kota Kecamatan Kelam Permai	Output : Jumlah Dokumen RDTRK Kawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	97,73 %	-	-	98,59 %
		Outcomes: Tersusunnya RDTRK dan Peraturan Zonasi Kota Kecamatan Kelam Permai								



0103.020401.31.068	Optimaliasai/Penambahan Menu Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Pada SIMTARU	Output: Laporan optimaliasai/penambahan menu pelayanan informasi pemanfaatan ruang Pada SIMTARU	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	96,20 %
		Outcomes: Terlaksananya kegiatan optimaliasai/penambahan menu pelayanan informasi pemanfaatan ruang Pada SIMTARU								
0103.020401.31.069	Revisi Dokumen Teknis dan Fasilitasi Perda RDTR Kota Sintang	Output: 1 Dokumen RDTR Kawasan Kota Outcomes: Dokumen RDTR Kawasan Kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan dan rujukan pemberian izin.	1 Dokumen	1 Dokumen	•	-	-	-	-	97,22 %
0103.020401.31.070	Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kota Sintang	Output: 1 Dokumen KLHS RDTR Kawasan Kota Sintang Outcomes: Dokumen KLHS RDTR_kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan & rujukan pemberian perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	98,44 %



0103.020401.31.072	Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Kelam dan Sungai Tebelian	Output: 1 Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Kelam dan Sungai Tebelia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	95,57 %	1 Dokumen	-	95,57 %
		Outcomes: Dokumen KLHS RDTR_kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan & rujukan pemberian perizinan								
0103.020401.31.075	Penyusunan dan penetapan Perda RDTR kawasan industri Sungai Ringin	Output: 1 Dokumen perda RDTR kawasan industri Sungai Ringin	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	99,91 %	-		99,91 %
		Outcomes: Dokumen perda RDTR kawasan industri Sungai Ringin yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan & rujukan pemberian perizinan								
0103.32	7. Program Pemanfaatan Ruang									
0103.020401.32.009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Output : Dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,94 %	1 Dokumen	-	99,73 %
		Outcomes : Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penataan ruang								
0103.020401.32.020	Persetujuan Siteplan/ Rencana Tapak	Output : laporan pelayanan persetujuan siteplan/rencana tapak	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	98,34 %



		Outcomes: kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang								
0103.020401.32.021	Penunjang Pelayanan Advice Planing/SKRK	Output: Surat Rekomendasi dan Informasi Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Lokasi Tertentu yang menggambarkan informasi pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis lainnya Outcomes: Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,37 %	1 Dokumen	-	98,90 %
0103.33	8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang									
0103.020401.33.005	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Output: Dokumen pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,89 %	18 kali	-	99,58 %
		Outcomes : Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang						15 kali		
0103.020401.33.009	Penyusunan SOP Pengawasan dan Pengendalian	Output: Dokumen SOP pengawasan dan pengendalian	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	97,01 %



		<u>Outcomes :</u> Tersedianya standarisasi/acuan yang dilakukan untuk								
		melaksanakan tugas di bidang Pengawasan dan Pengendalian								
0103.020401.33.011	Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah	Output: Dokumen evaluasi pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	96,16 %
		Outcomes: Terlaksananya Evaluasi pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah								
0103.020401.33.012	Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah	Output: Dokumen Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah Outcomes:	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	99,88 %
		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah								
0204.16	9. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah								-	-
0204.020401.16.003	Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan	Output : Jumlah Tanah yang Diganti Rugi untuk Pembangunan	6 Objek	6 Objek	4 Objek	1 Objek	75,56 %	4 Objek	-	75,1 %



Jumlah Patok Batas Tanah yang dipasang Outcomes: Terlaksananya Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab Sintang 0204.020401.16.008 Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang Outcomes: Jumlah Patok Batas Tanah yang dipasang Outcomes: Jumlah Sertipikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Sintang Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik Pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik pemkab Sintang yang terbit yang yang yang yang yang yang yang yang		ı	1		1	T	ı	1	ı	ı	1
Tanah Aset Pemkab Sintang Output: Jumlah Patok Batas Tanah yang dipasang Outcomes: Terlaksananya Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab Sintang O204.020401.16.008 Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang Outcomes: Terlaksananya pensertipikat tanah milik Pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik Pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang Output: Jumlah Patok Batas Tanah yang dipasang 30 Bidang 30 Bidang 30 Bidang 90,93 % Is Bidang 15 Bidang 15 Bidang 98,96 % Is Bidang 15 Bidang 98,96 % Is Bidang 15 Bidang 98,96 % Is Bidang 15 Bidang 15 Bidang 98,96 % Is Sertifikat - 88,8 % Output: Jumlah Jumlah Zin Lokasi yang di 15 Peta 10 Peta 10 Peta 99,21 % In Peta - 98,98 %			Terlaksananya Pengadaan Ganti								
Terlaksananya Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab Sintang 0204.020401.16.008 Pensertifikatan Tanah Aset Pemkab Sintang Pemerintah Kabupaten Sintang Outcomes: Terlaksananya Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab Sintang Outcomes: Terlaksananya Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab Sintang Outcomes: Terlaksananya pensertipikat tanah milik Pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik Pemkab Sintang yang terbit Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang Outcomes: Terlaksananya pensertipikat tanah milik Pemkab Sintang 15 Bidang 15 Bidang 15 Bidang 15 Bidang 16 Sertifikat - 88,8 % Outcomes: Terlaksananya pensertipikat tanah milik Pemkab Sintang 15 Bidang 15 Bidang 16 Sertifikat - 88,8 % Outcomes: Terlaksananya pensertipikat tanah milik Pemkab Sintang 15 Bidang 15 Bidang 16 Sertifikat - 88,8 % Outcomes: Terlaksananya pensertipikat tanah milik Pemkab Sintang 15 Bidang 15 Bidang 16 Sertifikat - 88,8 % Outcomes: Terlaksananya pensertipikat tanah milik Pemkab Sintang 16 Sertifikat - 88,8 % Outcomes: Terlaksananya pensertipikat tanah milik Pemkab Sintang 16 Sertifikat - 88,8 % Outcomes: Terlaksananya pensertipikat tanah milik Pemkab Sintang 16 Sertifikat - 88,8 % Outcomes: Terlaksananya pensertipikat tanah milik Pemkab Sintang 16 Sertifikat - 88,8 % Outcomes: Terlaksananya pensertipikat tanah milik Pemkab Sintang 16 Sertifikat - 88,8 % Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik Pemkab Sintang 16 Sertifikat - 88,8 % Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik Pemkab Sintang 16 Sertifikat - 88,8 % Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik Pemkab Sintang 16 Sertifikat - 88,8 % Outcomes: Terlaksananya pensertipikatan tanah milik Pemkab Sintang 16 Sertifikat Terlaksananya pensertipikatan tanah milik Pemkab Sintang 16 Sertifikat Terlaksananya pensertipikatan tanah milik Pemkab Sintang 18 Sertifikat Terlaksananya pensertipikatan tanah milik Pemkab Sint	0204.020401.16.004		Jumlah Patok Batas Tanah yang	30 Bidang	30 Bidang	30 Bidang	30 Bidang	90,93 %	224 Patok	-	94,45 %
Pemerintah Kabupaten Sintang Jumlah sertipikat tanah milik Pemkab Sintang yang terbit 15 Bidang 16 Sertifikat -			Terlaksananya Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab								
Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang 0204.020401.16.012 Pelayanan penerbitan izin, pengendalian penggunaan dan Jumlah Izin Lokasi yang di 15 Peta 15 Peta 10 Peta 99.21 % 10 Peta - 98,98 G	0204.020401.16.008		Jumlah sertipikat tanah milik	15 Bidang	15 Bidang	15 Bidang	15 Bidang	98,96 %	16 Sertifikat	-	88,8 %
pengendalian penggunaan dan Jumlah Izin Lokasi yang di 15 Peta 15 Peta 10 Peta 99.21 % 10 Peta - 98,98 °			Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang								
remanadan ranan terbikan	0204.020401.16.012			15 Peta	15 Peta	10 Peta	10 Peta	99,21 %	10 Peta	-	98,98 %
Outcomes: Terlaksananya Pemberian Izin Lokasi Perkebunan serta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			Terlaksananya Pemberian Izin Lokasi Perkebunan serta Penggunaan dan Pemanfaatan								
0204.17 10. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	0204.17	Konflik-konflik									
0204.020401.17.001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Output:	0204.020401.17.001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	Output :								



Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanhan Kabupaten Sintang Tahun 2021

	Pertanahaan	Permasalahan tanah yang	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	99,79 %	5 Kasus	_	99,21 %
	retailalladii	diselesaiakan	J Rusus	3 Rusus	J Rusus	5 Nasas	99,79 %	J Rusus		75,21 70
		Outcomes: Terselesaikannya permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat								
0204.18	11. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan								-	-
0204.020401.18.002	Pemetaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Output: Jumlah Peta Yang Dihasilkan Outcomes: Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kec. Tempunak	1 Peta	1 Peta	31 Peta	31 Peta	98,20 %	6 Peta	-	98, 29 %
0405.24	12. Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah									
0405.020401.24.018	Pameran pembangunan	Output: Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti Jumlah Pawai Pembangunan yang diikuti Outcomes: Meningkatnya Informasi Penataan Ruang dan Pertanahan	2 kegiatan	2 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 %	1 kegiatan	-	97,50 %
		bagi Masyarakat								
0405.020401.24.021	Peringatan Hari Besar Nasional	Output: Jumlah Spanduk yang disediakan								



Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanhan Kabupaten Sintang Tahun 2021

Jumlah Umbu-umbul yang disediakan	120 Meter 11 Buah	120 Meter 11 Buah	120 Meter 11 Buah	120 Meter 11 Buah	67,09 %	4 Meter	-	73,77 %
Outcomes : Terlaksanannya Hari-hari Besar Nasional								



Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2021 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan periode berikutnya. Disamping itu, Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2021, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini memuat usulan-usulan kegiatan tahun 2021 dengan pendekatan politik, teknokratik, partispatif, *top down*, dan *bottom up*. Pendekatan partisipatif dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan untuk memperoleh aspirasi masyarakat. Hasil musrenbang kecamatan yang menjadi rancangan Renja SKPD didiskusikan dalam Pra Musrenbang yang dihadiri oleh unsur-unsur kecamatan dan masyarakat untuk mensinergikan rencana program dan kegiatan tahun 2021

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 7 program, 13 kegiatan, dan 25 subkegiatan. Adapun yang menjadi prioritas program dan kegiatan pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sebagai berikut :

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- A. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
 - 2. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- B. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
- C. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota



Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1. Pengadaan Mebel
- 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

III. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI

Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha

IV. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

VI. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

Penerbitan Izin Membuka Tanah

1. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

VII. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Adapun Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :



A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

<u>Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021 (n)</u>

Pada tahun berjalan, yakni Tahun Anggaran tahun 2021 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mengelola dana APBD sebesar **Rp 8.622.696.873,00** (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian **Belanja Tidak Langsung** sebesar **Rp. 3.652.209.819,00** (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan ratus Sembilan Belas Rupiah), dan **Belanja Langsung Rp. 4.970.487.054,00** (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah).

Berikut kami sajikan tabel ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021:



Tabel 2.1
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun
Anggaran 2021

	URAIAN BELANJA		JUMLAH
A	Belanja	Rp.	8.622.696.873,00
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp.	3.652.209.819,00
	a. Gaji dan Tunjangan	Rp.	2.705.433.819,00
	b. Tambahan Penghasilan PNS	Rp.	946.776.000,00
2.	Belanja Langsung	Rp.	4.970.487.054,00
	a. Belanja Pegawai	Rp.	78.181.500,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.315.266.854,00
	c. Belanja Modal	Rp.	3.577.038.700,00
	Jumlah Total	Rp.	8.622.696.873,00

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Kerja (Renja) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada dasarnya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam strategi pemberdayaan aparatur guna mendukung kelancaran tugastugas dan fungsinya, diperlukan hal-hal seperti memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional secara berkala maupun insidentil, penempatan pegawai sesuai dengan pendidikan dan keahlian, peningkatan kesejahteraan pegawai berupa tambahan penghasilan pegawai dengan penekanan pada komitmen selaku pelayan masyarakat dan mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas pegawai yang berkelanjutan.



b. Strategi Kelembagaan

Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

c. Strategi di Bidang Prasarana, Sarana, dan Pendanaan.

Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu - isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi. Dalam arti melaksanakan tertib administrasi, tertib keuangan, dan tertib pelaksanaan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran guna terciptanya anggaran berbasis kinerja.

kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, terutama yang menyangkut jenis pelayanan dasar Pelayanan Dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan, ditetapkan sbb:



Tabel Nomor 2.2 Target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Indikator	Nilai	Waktu	Ket
	Indikator	INIIGI	(Tahun)	Ket
1.	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	2017	-
2.	Luas wilayah produktif	100 %	2017	1
3.	Luas wilayah industri	100 %	2017	1
4.	Luas wilayah perkotaan	100 %	2017	-
5.	Aset tanah Pemerintah Kabupaten Sintang bersertifikat	90 %	2020	-
6.	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	50 %	2020	-
7.	Penyelesaian konflik tanah aset Pemerintah Kabupaten Sintang	70 %	2020	-
8.	Penyelesaian ijin lokasi baru	100 %	2020	-
9.	Penyelesaian ijin lokasi perpanjangan	100 %	2020	-

Standar Pelayanan Minimal di atas, dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang 2017 - 2021 serta ditindaklanjuti di dalam Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang 2017 - 2021 sebagai berikut



Tabel Nomor 2.3 Target Capaian Kinerja 2016 - 2021

Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ketaatan terhadap RTRW	80 %	82 %	84 %	85 %	85 %
2.	Luas wilayah produktif	776696,35 Ha	826976,80 Ha	777411,80 Ha	777411,80 Ha	777411,80 Ha
3.	Luas wilayah industri	7724,48 Ha	7724,48 Ha	9269,38 Ha	9269,38 Ha	9269,38 Ha
4.	Luas wilayah perkotaan	34258,73 M2	34258,73 M2	34258,73 M2	34258,73 M2	34258,73 M2
5.	Aset tanah Pemerintah Kabupaten Sintang bersertifikat	18 Sertifikat	8 Sertifikat	8 Sertifikat	8 Sertifikat	8 Sertifikat
6.	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	10 Objek	8 Objek	8 Objek	4 Objek	4 Objek
7.	Penyelesaian konflik tanah aset Pemerintah Kabupaten Sintang	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus
8.	Penyelesaian ijin lokasi baru	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi
9.	Penyelesaian ijin lokasi perpanjangan	9 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi



Capaian kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mengacu kepada indikator SPM sampai dengan Tahun 2017 dan rencana Tahun 2019 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Nomor 2.4

Capaian Kinerja Tahun 2019, Asumsi Tahun 2020 dan Rencana Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan

		Capaian	Asumsi	Rencana	
No	Indikator	Tahun	Tahun	Tahun	Ket
		2019	2020	2021	
1.	Ketaatan terhadap RTRW	99 %	100 %	100 %	-
2.	Luas wilayah produktif	26.599 Ha	777411,80 Ha	572543,03 Ha	-
3.	Luas wilayah industri	3.151,09 Ha	9269,38 Ha	3151,09 Ha	-
4.	Luas wilayah perkotaan	19.585,47 M2	34258,73 M2	19585,47 M2	-
5.	Aset tanah Pemerintah Kabupaten Sintang bersertifikat	0 Sertifikat	10 Sertifikat	10 Sertifikat	-
6.	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	8 objek	4 Objek	10 objek	-
7.	Penyelesaian konflik tanah aset Pemerintah Kabupaten Sintang	0 Kasus	5 Kasus	10 Kasus	-
8.	Penyelesaian ijin lokasi baru	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	-
9.	Penyelesaian ijin lokasi perpanjangan	1 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	-



Dalam rangka meningkatkan pengembangan wilayah pada kawasan ekonomi khusus yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional. Aspek Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal Penataan Ruang merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dokumen Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat digambarkan pada Tabel T-C.30 berikut :



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROY	CATATAN ANALISIS	
				Tahun 2019 (tahun n-2)	Tahun 2020 (tahun n-1)	Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2022 (tahun n+1)	Tahun 2019 (tahun n-2)	Tahun 2020 (tahun n-1)	Tahun 2021 (tahun n)	Tahun 2022 (tahun n +1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ketaatan terhadap RTRW	2017	100 %	82 %	84 %	85 %	85 %	99 %	100 %	100 %	100 %	-
2.	Luas wilayah produktif	2017	100 %	826976,80 Ha	777411,80 Ha	777411,80 Ha	777411,80 Ha	26.599 Ha	28.592 Ha	572543,03 Ha	572543,03 Ha	-
3.	Luas wilayah industri	2017	100 %	7724,48 Ha	7724,48 Ha	9269,38 Ha	9269,38 Ha	3.151,09 Ha	3.151,09 Ha	3151,09 Ha	3151,09 Ha	-
4.	Luas wilayah perkotaan	2017	100 %	34258,73 M2	34258,73 M2	34258,73 M2	34258,73 M2	19585,47 M2	19585,47 M2	19585,47 M2	19585,47 M2	-
5.	Aset tanah Pemerintah Kabupaten Sintang bersertifikat	2020	90 %	8 Sertifikat	8 Sertifikat	8 Sertifikat	8 Sertifikat	0 Sertifikat	0 Sertifikat	10 Sertifikat	10 Sertifikat	-
6.	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	2020	50 %	8 objek	4 objek	4 objek	10 Objek	4 objek	1 objek	10 objek	10 objek	-



Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanhan Kabupaten Sintang Tahun 2021

7.	Penyelesaian konflik tanah aset Pemerintah Kabupaten Sintang		70 %	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	-
8.	Penyelesaian ijin lokasi baru	2020	100 %	2 Lokasi	3 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	-				
9.	Penyelesaian ijin lokasi perpanjangan	2020	100 %	9 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	1 Lokasi	0 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	-



Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkankan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, menjelaskan bahwa Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Dalam Peraturan Bupati tersebut, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan pelaksana urusan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Bidang sesuai dengan bidang kewenangannya, sementara tugas dari masingmasing Bagian di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut .

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam bidang Administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan, serta melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian peralatan.

2) Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pembinaan bidang penataan ruang dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3) Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman, program, kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengaturan, penguasaan, penatausahaan pertanahan, pengelolaan pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertananahan.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 3) Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan pembinaan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 5) Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruangdan Pertanahan;
- 6) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 7) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 9) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 10) Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 11) Penyusunan analisa jabatan;
- 12) Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

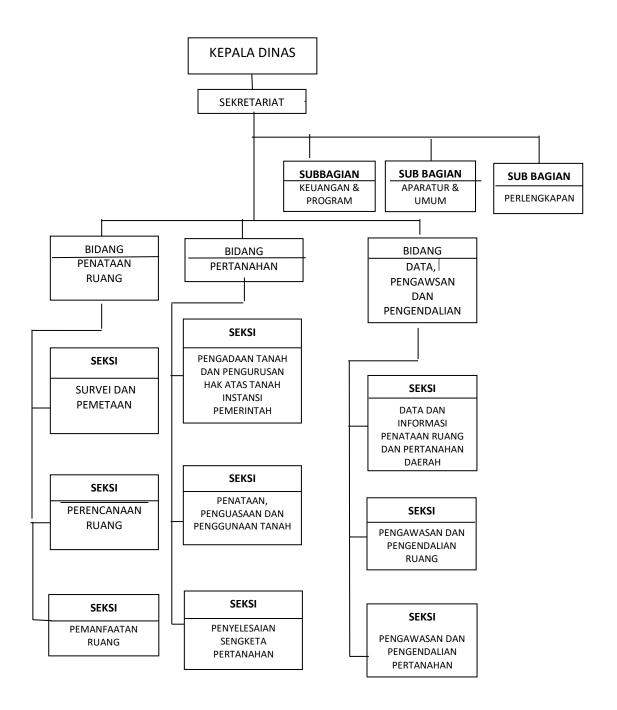
Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Penataan Ruang;
- 4) Bidang Pertanahan;
- 5) Bidang Data, Pengawasan dan Pengendalian;



Bagan Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG





Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- 1) Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang tidak dilaksanakan
- 2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang tidak dilaksanakan
- 3) Belum adanya perangkat atau instrumen kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang
- 4) Meningkatnya beban kerja antar perangkat daerah karena harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap usulan pemanfaatan ruang oleh stakeholder.Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara konseptual dan strategis.
- 5) Keterbatasan kemampuan pegawai dalam melaksanakan kegiatan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Perlu dilakukan penyusunan Rencana Detail/ Rencana Rinci Penataan Ruang yang Baru berkaitan dengan rencana pengembangan Kabupaten Sintang kedepan.
- 6) Kurangnya kegiatan sosialisasi produk hukum dan teknis rencana tata ruang
- 7) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai alih fungsi lahan sesuai peruntukannya
- 8) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perizinan pembangunan di atas lahan sesuai dengan peruntukannya
- 9) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa pertanahan antar milik pribadi ataupun antar milik pribadi dan pemerintah.
- 10) Kurangya koordinasi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- 11) Kurangnya koordinasi antar bidang dalam setiap program dan kegiatan perangkat daerah
- 12) Kurangnya sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar perangkat daerah
- 13) Tidak ada prosedur baku dalam rangka penertiban ketidaksesuaian antara rencana pemanfaatan ruang dan pemanfaatan ruang
- 14) Kurangnya upaya penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah



15) Belum optimalnya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah negara atau tanah bekas hak

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, tantangan yang dihadapi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah .

- 1. Belum diperbaharuinya produk hukum RTRW terkait tata ruang
- 2. Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.
- 3. Konsistensi antara pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sering tidak sesuai.
- 4. Sering terjadinya pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 5. Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar rencana tata ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sedangkan peluang bagi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya adalah :

- Adanya peluang dan keleluasaan yang diberikan Pusat kepada Daerah dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga daerah dapat berkreativitas dalam membangun daerahnya masingmasing.
- Adanya kemudahan dalam penetapan perkada berdasarkan pada UU Nomor
 Tahun 2020 tentang cipta kerja di terjemahkan kedalam PP 21 Tahun
 Bahwa penetapan perda bisa di tetapkan melalui peraturan menteri.
- 3. Sumber pembiayaan dalam Penyusunan produk perundang-undangan daerah terkait penataan ruang dalam bentuk (RTRW dan RDTR) bisa diusulkan kedalam sumber pendanaan APBN.



- 4. Terjalinnya hubungan kerja sama yang baik antara Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dengan Universitas setempat maupun provinsi dan tawaran diklat dari Bappenas, lembaga diklat, dan perguruan tinggi sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 3) Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan pembinaan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 5) Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 2) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 6) Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 7) Penyusunan analisa jabatan;
- 8) Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2.3. Isu — isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan telahaan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:

a. Minim anggaran perangkat daerah

- Minimnya anggaran untuk melaksanakan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
- Minimnya anggaran untuk menyusun dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang masih belum tersusun
- Minimnya anggaran untuk melaksanakan proses penetapan peraturan daerah terhadap produk-produk tata ruang terutama pada Rencana Detail Tata Ruang

b. Terhambatnya Penetapaan peraturan daerah dan kepala daerah terhadap produk tata ruang

- Belum adanya perangkat atau instrumen untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah
- Meningkatnya beban kerja antar perangkat daerah karena harus koordinasi dan sinkronisasi terhadap usulan pemanfaatan ruang oleh stakeholder

c. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam perangkat daerah

- Kurangnya kegiatan pelatihan informal yang mendukung program dan kegiatan perangkat daerah
- Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang
- Ketidakmampuan sumber daya manusia dalam menjalankan program dan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi suatu jabatan
- Ketidak sesuaian antara kompetensi dasar dengan fungsi dan jabatan
- Keterbatasan kemampuan dalam menyusun prosedur baku kegiatan

d. Kurangnya pengaturan dalam pelaksanaan program dan kegiatan



- Belum adanya prosedur baku dalam melaksanakan penertiban ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana pemanfaatan ruang
- Belum ada prosedur baku kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang

e. Kurangnya kuantitas dan kualitas produk rencana tata ruang

- Belum dilaksanakannya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
- Belum disusunnya Rencana Detail Tata Ruang pada beberapa Kawasan Perkotaan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang

f. Belum optimalnya penyebaran informasi tata ruang dan pertanahan

- Belum optimalnya penyebaran informasi produk tata ruang yang berbasis digital
- Kurangnya sosialisasi peraturan daerah tentang ketentuan pemanfaatan ruang
- Kurangnya sosialisasi produk hukum dan teknis rencana tata ruang
- Kurangnya sosialisasi dan negosiasi tentang ganti rugi tanah kepada masyarakat yang obyeknya terkena pembangunan.
- Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi penataan ruang
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai alih fungsi lahan sesuai peruntukannya
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perizinan pembangunan di atas lahan sesuai dengan peruntukannya
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa pertanahan antar milik pribadi ataupun antar milik pribadi dan pemerintah

g. Lemahnya kemampuan kelembagaan perangkat daerah

- Kurangnya upaya sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar perangkat daerah
- Masih ditemukan sikap ego sektoral antar perangkat daerah
- Terbatasnya kemampuan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Kurangnya koordinasi antar bidang dalam setiap program dan kegiatan perangkat daerah



Kurangnya koordinasi perangkat daerah dalam kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ruang

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan pelaksana urusan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Bidang sesuai dengan bidang kewenangannya, sementara tugas dari masing - masing Bagian di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

10) Kepala Dinas

Kepala Dnas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Penataan Ruang dan Pertanahan ;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidangbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati;
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- h. Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- i. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;



- k. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam bidang Administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan, serta melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian peralatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penghimpunan, mengkoordinasi dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip, dan barang serta peralatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Penghimpunan peraturan, Perundang Undangan dan dokumen yang yang berkaitan dengan pelaksaan tugas;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan barang, peralatan dan memberikan pelayanan teknis adminitrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- h. Pelaskanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan



k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12) Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan tata ruang detail dan teknis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penataan Ruang menyelenggrakan Fungsi;

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- b. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bidang Bidang Penataan Ruang;
- d. Penghimpunan peraturan Perundang-Undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang;
- f. Perumusan kebijakan Perencanaan,
- g. dan Pengendalian Tata Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai arah pemanfaatan pengendalian;Pengoordinasian penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai fasilitas umum yang representatif;
- h. Pengoordinasian penyediaan informasi Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan menjadi data pemanfaatan kawasan;
- Pengoordinasikan pelayanan pengaduan pelanggaran Tata Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan evaluasi pemanfaatan kawasan;
- j. Perumusan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaran tata ruang;
- k. Perencanaan oprasional detail Tata Ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan tata ruang;



- I. Penggelolaan perencanaan dan pengendalian tata ruang;
- m.Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

13) Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman, program kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengaturan, penguasaan, penatagunaan dan pengelolaan pertanahan.

Untuk menyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang pertanahan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis pertanahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan bidang pertanahan;
- d. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Penyelenggaran perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- f. Perencanaan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah;
- g. Pelaksanaan inventarisasi, pengendalian, penguasaan, penggunaan tanah dan bangunan tanah;
- h. Penyiapan data untuk menangani dan menyelesaiakan sengketa tanah;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan pada masyarakat;
- j. Pelakasanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengadaan tanah;
- k. Pelaksanaan pengurusan hak-hak atas tanah perseorangan dan badan hukum;
- I. Pelaksaaan kebijakan Redistribusi Tanah;
- m.Pelaksanaan kebijakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- n. Perumusan kebijakan tentang tanah ulayat;



- o. Perumusan kebijakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kebupaten;
- p. Pelaksanaan inventarisasi tanah kosong;
- q. Penyusunan kebijakan pemanfataan tanah kosong;
- r. Pelaksaaan proses penerbitan izin pembukaan tanah sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
- s. Perumusan rencana penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- t. Penyelenggaran fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- u. Penyiapan kegiatan dibidang perizinan tata guna tanah, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
- v. Pengumpulan bahan, penataan, monitoring dan evaluasi pengukuran hakhak atas tanah; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

14) Bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian

Pengumpulan bahan dan pengolahan data, penyusunan pedoman, program, kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian ruang dan pertanahan.

Untuk menyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian;
- b. Perencanaan dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pemantauan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam pengendalian ruang dan pertanahan;
- c. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengkajian dan pembinaan teknis dengan instansi terkait terhadap



- pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam pengendalian ruang dan pertanahan;
- d. Pemberian saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- e. Perumusan dan penytusunan kebijaksanaan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan pengolahan pertanahan;
- f. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan daya dukung alam terhadap segala aktifitas pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengawasan dan pengendalian;
- Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan penataan ruang dan penyelenggaran ganti rugi tanah, penguasaan tanah, pemanfaatan tanah, penggunaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
- j. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pertanahan;
- k. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 3) Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan pembinaan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 5) Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;



- 15) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 16) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 17) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 18) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 19) Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 20) Penyusunan analisa jabatan;
- 21) Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- 22) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Sintang tahun 2020 merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada awal tahun 2020. Rancangan awal RKPD adalah kesepakatan yang dihasilkan oleh SKPD dengan usulan dari musrenbang tingkat kecamatan.

Reviu rancangan awal RKPD dilakukan terhadap kegiatan prioritas selain sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat, juga sebagai bentuk penyelarasan dengan tema pembangunan tahun 2021 yaitu "Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sanitasi, Optimalisasi Air Bersih dan Peningkatan Energi Baru Terbarukan". Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.



Adapun Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sintang dapat digambarkan pada Tabel T-C.31 sebagai berikut :



Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sintang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang

		Ranc	angan Awal RK	(PD			Hasil A	nalisis Kebut	uhan		
N	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan	Catatan
0			Kinerja	Capaian				Kinerja	Capaian	Dana	Penting
1	2	3	4	<i>5</i>	6	7	8	9	10	11	12
	Program		Terpenuhinya	Jumlah	4,992,460	Program		Terpenuhin	Jumlah	15,127,420	
	Penunjang Urusan		Komponen	Peralatan		Pelayanan		ya	Peralatan		
	Pemerintahan	Dinas	Instalasi	Listrik Yang		Administrasi	Dinas	Komponen	Listrik Yang		
	Daerah/	Penataan	Listrik/Penera	Tersedia 9		Perkantoran	Penataan	Instalasi	Tersedia 9		
	Administrasi	Ruang	ngan	Komponen			Ruang	Listrik/Pen	Komponen		
	Umum	Kabupaten	Bangunan			Penyediaan	Kabupate	erangan			
	Penyediaan	Sintang	Kantor yang			Komponen Instalasi	n Sintang	Bangunan			
	Komponen Instalasi		dapat			Listrik/Penerangan		Kantor			
	Listrik/Penerangan		meninkatkan			Bangunan Kantor		yang dapat			
	Bangunan Kantor		sarana dan					meninkatka			
			prasarana					n sarana			
			aparatur					dan			
								prasarana			



Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanhan Kabupaten Sintang Tahun 2021

							aparatur			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penataan Ruang Kabupaten Sintang	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dapat meninkatkan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Alat Tulis kantor yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	27,770,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penataan Ruang Kabupate n Sintang	Terpenuhin ya Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang dapat meninkatka n sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Alat Tulis kantor yang disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkap an Kantor	34,799,600	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Penataan Ruang Kabupaten Sintang	Tersedianya Pengadaan Barang di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Audio Visual untuk menunjang Pelayanan	85,928,700	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersediany a Pengadaan Barang di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Penunjang Urusan	Jumlah Peralatan dan Perlengka pan Kantor Audio Visual untuk	104,408,700	



Daerah Administrasi Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Drone yang tersedianya untuk menunjang Pelayanan Administrasi Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Printer dan Komputer	Pemerintah Daerah	menunjan g Pelayanan Administra si Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengka pan Kantor Drone yang tersediany a untuk menunjan g Pelayanan Administra si Kantor Jumlah
yang		Peralatan





Drone yang tersedianya untuk menunjang Pelayanan Administrasi	Visual untuk menunjan g Pelayanan Administra
Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Printer dan Komputer yang tersedianya	si Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengka pan Kantor Drone yang tersediany
untuk menunjang Pelayanan Administrasi Kantor	a untuk menunjan g Pelayanan Administra si Kantor

Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanhan Kabupaten Sintang Tahun 2021

								Jumlah Peralatan dan Perlengka pan Kantor Printer dan Komputer yang tersediany a untuk menunjan g Pelayanan Administra si Kantor		
Penyediaan Jasa Peralatan dan		Tersedianya	Jumlah Pemakaian	4,994,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan		Tersediany	Jumlah	18,788,000	
		Jasa					a Jasa	Pemakaian		
Perlengkapan Kantor	Dinas	Penunjang	Jasa		Perlengkapan Kantor	Dinas	Penunjang	Jasa		
	Penataan	Urusan	Pemeliharaan			Penataan	Urusan	Pemeliharaa		
	Ruang	Pemerintah	Peralatan dan			Ruang	Pemerintah	n Peralatan		
	Kabupaten	Daerah	Perlengkapan		(0)	Kabupate	Daerah	dan		

Sintang	Kantor (Komputer/La ptop)		n Sintang		Perlengkapa n Kantor (Komputer/L aptop)		
		Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Terlaksana nya rehabilitasi gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75,000,000	





2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, tugas pokok Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat desa, kecamatan maupun di tingkat Kabupaten. Selain itu, pihak masyarakat atau pemangku kepentingan dapat juga menyampaikan usulan kegiatan pelayanan dokumen kependudukan secara langsung ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, melalui surat secara resmi.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sangatlah penting dalam menunjang penyusunan program pembangunan di berbagai bidang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika dilihat dari perkembangan kawasan industri dan perkebunan di Kabupaten Sintang pada 5 (lima) Tahun terakhir 2013 - 2017 terdapat peningkatan yang cukup signifikan.

Program Penataan Ruang dan Pertanahan dilaksanakan melalui pendataan penduduk datang maupun pergi serta memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat mengenai cara mendapatkan surat rekomendasi penerbitan izin lokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pengaduan sengketa pertanahan. Tujuan dari program ini untuk mewujudkan tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan melalui pengawasan, pelayanan, analisa dan pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah dengan sasaran meningkatkan prosentase kepemilikan sertifikat pertanahan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu isu strategis yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan dokumen Pertanahan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen Pertanahan dan melaporkan kejadian/peristiwa penting. Oleh sebab itu usulan dari masyarakat menjadi



pertimbangan penting, selain untuk peningkatan cakupan pelayanan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan, juga untuk efektif dan efisien penggunaan anggaran.

Usulan masyarakat telah ditampung dan dipertimbangkan untuk ditangani,namun masih banyaknya usulan masyarakat yang belum dapat direalisasi akibat keterbatasan.

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang akan menyempurnakan usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2021 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat digambarkan pada Tabel T-C.32 sebagai berikut :



Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sintang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Perencanaan Tata Ruang. Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR)	Kecamatan Kelam Permai	Dokumen KLHS RDTR Kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	1 Dokumen	-
2.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan	Kecamatan Kayan Hilir	Terlaksananya pemasangan tanda batas aset pemkab sintang	15 Bidang (60 patok)	-
	Pemanfaatan Tanah 1. Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang	Kecamatan Kayan Hulu	Terlaksananya pemasangan tanda batas aset pemkab sintang	15 Bidang (60 patok)	-
	Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang	Kecamatan Kayan Hilir	Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	4 sertifikat	-
	Pemerintah Kabupaten Sintang	Kecamatan Kayan Hulu	Kepemilikan Sertifikat Tanah	4 sertifikat	-



		aset pemda Sintang		
	Kecamatan Ketungau	Kepemilikan Sertifikat Tanah	4 sertifikat	
	hulu	aset pemda Sintang		
	Kecamatan Ketungau	Kepemilikan Sertifikat Tanah	4 sertifikat	
	Tengah	aset pemda Sintang		
3. Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk		Terlaksananya pengadaan ganti	1 objek	-
Pembangunan	hulu	rugi tanah untuk pembangunan		
rembangunan	Kecamatan Ambalau	Terlaksananya pengadaan ganti	1 objek	-
		rugi tanah untuk pembangunan		
	Kecamatan Sepauk	Terlaksananya pengadaan ganti	1 objek	=
		rugi tanah untuk pembangunan	-	
	Kecamatan Sungai	Terlaksananya pengadaan ganti	2 objek	
	Tebelian	rugi tanah untuk pembangunan		
	Kecamatan Sepauk	Terlaksananya pengadaan ganti	1 objek	-
		rugi tanah untuk pembangunan		
	Kecamatan Binjai Hulu	Terlaksananya pengadaan ganti	1 objek	-
		rugi tanah untuk pembangunan		
4. Pelayanan Penerbitan Izin	14 Kecamatan	Terlaksanya Pemberian Izin	10 peta	-
Pengendalian Penggunaan dan		Lokasi Perkebunan Serta		
i chigchidallari i chiggaridari dari		Penggunaaan dan Pemanfaatan		
Pemanfaatan Tanah		Tanah		



BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Dalam RPJMD 2016-2021, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, terkait dengan pembangunan kabupaten. Kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten.

1.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Renja merupakan pedoman perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan (OPD) secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala OPD menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya



dengan mengacu pada Renstra OPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sedangkan sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang merupakan salah satu OPD di Kabupaten Sintang di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang memiliki kinerja sebagai berikut :

- a. Ketaatan terhadap RTRW
- b. Luas wilayah produktif
- c. Luas wilayah industri
- d. Luas wilayah perkotaan
- e. Aset tanah Pemerintah Kabupaten Sintang bersertifikat
- f. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
- g. Penyelesaian konflik tanah aset Pemerintah Kabupaten Sintang
- h. Penyelesaian ijin lokasi baru
- i. Penyelesaian ijin lokasi perpanjangan



Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, maka dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 3. Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 4. Pelaksanaan pembinaan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 5. Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 6. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 10. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 11. Penyusunan analisa jabatan analisis, beban kerja dan evaluasi jabatan;
- 12. Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan urusan Pemerintahan Daerah



berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Sintang dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sintang yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021"

Melalui visi tersebut, disusun visi dan misi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016-2021. Adapun Visi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah "Terwujudnya Penataan, Pemanfaatan, Pengendalian Ruang dan Tertib Pertanahan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan"

Dalam mewujudkan cita-cita sesuai Visi , maka perlu menjabarkan menjadi Misi agar dapat menjadi pedoman dalam perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun kedepan. Adapun misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- 2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- 3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- 4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- 5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten SintangTahun 2021 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan	Terwujudnya tata	Ketaatan terhadap RTRW
	kualitas	ruang wilayah	Luas wilayah produktif
	lingkungan	sesuai dengan	Luas wilayah industri
	hidup	Peraturan daerah	Luas wilayah perkotaan
		mengenai RTRW	Aset tanah Pemkab Sintang
			bersertifikat
			Pengadaan tanah untuk
			pembangunan bagi kepentingan
			umum
			Penyelesaian konflik tanah asset
			Pemkab Sintang
			Penyelesaian izin lokasi baru
			Penyelesaian izin lokasi perpanjangan



III.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 memuat 7 program, 13 kegiatan, dan 25 subkegiatan (DAU) dengan jumlah dana sebesar Rp 8.622.696.873,00

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.33 sebagai berikut :

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi: 2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

							Indikator Kinerja			Rencar	na Tahun 202	1			Prakiraan N	laju Rencana Ta	hun 2022
				Urusai	n/ Bidang Urusan/					Target Capaian K	inerja			Catatan	Target Capaian	Kinerja	
	K	Code		Progra	am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Rebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1				URUSA	AN PEMERINTAHAN	WAJIB YANG BERKAITAN I	DENGAN PELAYANAN DASAR										
1 03	3			URUSA	AN PEMERINTAHAN	BIDANG PEKERJAAN UMU	M DAN PENATAAN RUANG					858,365,036					987,119,792
1 03	12			PROGR	RAM PENYELENGGAI	RAAN PENATAAN RUANG						858,365,036					987,119,792
1 03	12	2.0	01	Peneta	apan Rencana Tata Ru	uang Wilayah (RTRW) dan	Rencana Rinci Tata Ruang (RR	TR) Kab/Kota				338,707,152					389,513,225
1 03	12	2.0	01 03	dalam l	ipan Kebijakan Rangka Pelaksanaan ian Ruang		Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Kayan Hulu yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan			1 Dokumen		338,707,152	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				389,513,225
1 03	12	2.0	02	Koordi	inasi dan sinkronisas	i Perencanaan Tata Ruang I	Daerah Kabupaten/Kota		I	<u> </u>	I	228,620,784		I			262,913,902
1 03	12	2.0	02 02	Sinkron	nasi dan nisasi Penyusunan Kabupaten/Kota		Serasinya Perencanaan Penataan Ruang kabupaten, Provinsi Maupun Pusat			9 OT		139,310,392	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				160,206,951
1 03	12	2.0	03	Masyar	ikatan Peran rakat dalam ian Ruang		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			1 Dokumen		89,310,392	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				102,706,951
1 03	12	2.0	03	Koordi	inasi dan Sinkronisas	i Pemanfataan Ruang Daer	rah Kabupaten/Kota					201,726,708					231,985,714
1 03	12	2.0	03 01	Sinkron Ruang	nasi dan nisasi Pemanfaatan untuk Investasi dan Ingunan Daerah		Terlaksananya Laporan Pelayanan Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak dan Surat Rekomndasi dan Informasi Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Lokasi tertentu yang Mengambarkan Informasi Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Teknis Lainnya			60 OT		201,726,708	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				231,985,714
	-	2.0	24	W = =	inasi dan Cinkusnisas	i Danmandalian Danmanfata	an Ruang Daerah Kabupaten/I	/ata			1	89,310,392					102,706,951

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi: 2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

						Indikator Kinerja				Rencan	a Tahun 2021	1			Prakiraan M	aju Rencana Tal	nun 2022
				Urusan/ Bidang Urusan/					Targ	et Capaian Ki	nerja			Catatan	Target Capaian	Kinerja	
	Kod	de		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
03	12	2.04	4 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen		89,310,392	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				102,706,95 ⁻²
				URUSAN PEMERINTAHA	N WAJIB YANG TIDAK BERK	AITAN DENGAN PELAYANAN I	DASAR										
10				URUSAN PEMERINTAHA	N BIDANG PERTANAHAN							9,441,311,920)				10,857,508,709
10	01			PROGRAM PENUNJANG	URUSAN PEMERINTAHAN I	DAERAH						4,068,722,192					4,679,030,521
10	01	2.0)1	Perencanaan dan Evaluas	i Kinerja Perangkat Daerah							62,628,844					72,023,171
10	01	2.01	1 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		terlaksananya pembinaan yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran dan tupoksi DPRP				1 tahun		62,628,844	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				72,023,171
10	01	2.0	2	Administrasi Keuangan	1							3,454,516,229		I			3,972,693,663
10	01	2.02	2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Tambahan Penghasilan ASN				1 Tahun 1 Tahun		3,429,516,229	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3,943,943,663
10	01	2.07	2 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		tersusunnya laporan capaian dan ikhitiar realisasi kinerja SKPD				1 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11,500,000
10	01	2.02	2 07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		tersusunnya laporan semesteran yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan				1 Dokumen		7,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,625,000
10	01	2.02	2 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		tersusunnya laporan akhir tahun yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan				1 Dokumen		7,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,625,000
10	01	2.0	3	Administrasi Umum	•			•	•	•	•	551,577,119				•	634,313,687

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

						Indikator Kinerja				Rencan	na Tahun 2021	l			Prakiraan M	aju Rencana Tal	nun 2022
				Urusan/ Bidang Urusan/					Targ	et Capaian Ki	inerja			Catatan	Target Capaian	Kinerja	
	Koc	de		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
10	01	2.03	3 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		terpenuhinya perlengkapan surat menyurat yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran				300 lembar		1,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1,725,000
10	01	2.03	3 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		tersedianya jasa telpon,air dan listrik yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran				12 bulan		70,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				80,500,000
10	01	2.03	3 04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns		Tersedianya Jaminan Kematian ASN Tersedianya Jaminan Kesehatan ASN Tersedianya Jaminan Keselamatan Kerja ASN				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun		179,031,883	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				205,886,665
10	01	2.03	3 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		tersedianya surat-surat kendaraan dinas/operasional yg dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran				16 unit		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11,500,000
10	01	2.03	3 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		tersedianyaa buku cek				12 bulan		1,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1,725,000
10	01	2.03	3 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		tersedianya kebersihan dan bahan pembersih yg dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya tenaga kontrak				3 unit 2 Orang		39,484,472	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				45,407,143
10	01	2.03	3 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		jumlah komputer yang terpelihara jumlah laptop yang terpelihara jumlah printer yang terpelihara				10 unit 10 unit 13 unit		5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,750,000
10	01	2.03	3 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		terpenuhinya atk yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran				1 tahun		25,560,764					29,394,879

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi: 2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

						Indikator Kinerja		<u> </u>		Rencan	na Tahun 2021	<u> </u>			Prakiraan M	aju Rencana Tal	nun 2022
				Urusan/ Bidang Urusan/					Targ	jet Capaian Ki	inerja			Catatan	Target Capaian	Kinerja	
	Ко	ode		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	- Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
10	01	2.03	3 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		tersedianya barang cetakkan dan pengadaan yang dapat menunjang administrasi perkantoran				35 buku		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11,500,000
10	01	2.03	3 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah peralatan listrik yang tersedia				12 jenis		5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5,750,000
10	01	2.03	3 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor drone tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor printer dan				1 buah 2 buah		40,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				46,000,000
10	01	2.03	3 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		jumlah surat kabar dan perundang undang yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran				4 jenis		7,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,050,00
10	01	2.03	3 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah bahan bakar minyak BBM yang dibutuhkan jumlah bahan dekorasi dan jumlah hadiah				1200 liter 4 jenis		25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				28,750,000
10	01	2.03	3 17	Penyediaan Makanan dan Minuman		tersedianya makan untuk kegiatan rapat dalam satu tahun tersedianya snack untuk kegiatan rapat dalam satu tahun				342 kotak 342 kotak		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				17,250,000
10	01	2.03	3 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		jumlah rapat koordinasi konsultasi keluar luar kabupaten jumlah rapat koordinasi konsultasi keluar provinsi				7 kali 5 kali		90,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				103,500,000
10	01	2.03	3 25	Pengadaan Mebeleur		tersedianya meja rapat				1 unit		7,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8,625,000

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

							Indikator Kinerja				Rencan	a Tahun 2021	<u> </u>]	Prakiraan N	laju Rencana Ta	nun 2022
					Urusan/ Bidang Urusan/					Targe	t Capaian Ki	nerja			1	Target Capaian	Kinerja	
	K	Code			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana, Pagu Indikatif (Rp.)
10	01	2.	03 3	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		terpeliharanya kendaraan roda empat				3 unit		20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				23,000,00
10	04				PROGRAM PENYELESAIAN	SENGKETA TANAH GARAP	AN						84,484,472					97,157,14
10	04	2.	.01		Penyelesaian Sengketa Tan	nah Garapan dalam Daerah	Kabupaten/Kota.						84,484,472					97,157,14
10	04	2.	01 0	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.		Permasalahan Tanah yang terselesaikan				5 Kasus		84,484,472	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				97,157,14
10	05				PROGRAM PENYELESAIAN	I GANTI KERUGIAN DAN SA	INTUNAN TANAH UNTUK PEN	/BANGUNAN		1		Į	5,034,484,472					5,789,657,14
_	05	_	.01				anah untuk Pembangunan ole		upaten/Kota				5,034,484,472					5,789,657,14
10	05	2.	01 0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengadaan Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan				2 Objek		5,034,484,472	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5,789,657,14
10	09				PROGRAM PENGELOLAAN	IZIN MEMBUKA TANAH							89,310,392					102,706,95
10	09	2.	.01		Penerbitan Izin Membuka	Tanah							89,310,392					102,706,95
10	09	2.	01 0		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Tanah				1 Dokumen		89,310,392	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				102,706,95
10	10				PROGRAM PENATAGUNAA	AN TANAH	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	164,310,392		•		•	188,956,95
10	10	2.	.01		Penggunaan Tanah yang H	lamparannya dalam satu Da	erah Kabupaten/Kota						164,310,392					188,956,95
10	10	2.	01 0	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pemasangan tanda batas aset Pemerintah Kabupaten Sintang				56 Patok		164,310,392	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				188,956,95

Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Sub Unit Organisasi : 2.10.1.03.0.00.23.0000 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

			Indikator Kinerja				Rencan	a Tahun 2021				Prakiraan Ma	aju Rencana Tal	nun 2022
	Urusan/ Bidang Urusan/				Lakasi	Targ	et Capaian Ki	inerja			Catatan	Target Capaian	Kinerja	Kabutuban Dana/
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								TOTAL	10,299,676,956					11,844,628,501



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah adalah Rencana kerja dan pendanaan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang untuk Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun rumusan Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah adalah Rencana kerja dan pendanaan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel T-B.36 sebagai berikut:



Tabel-B.36

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang

Kode	Program dan	Indikator Kinerja	Data Capai an padal Tahun				Targe	t Kinerja I	Program dar	n Kerangka	Pendana	an			
	Kegiatan	Program dan Kegiatan	Awal Peren canaa n	ıaı	hun - 1	Та	hun - 2	Tal	hun - 3	Tahu	ın - 4	Та	hun - 5	pa	lisi Kinerja da akhir de Renstra PD
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp

1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota														
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	tersusunnya dokumen RTRW, RRTR dan RDTR	1 Dokumer	6 Dokumen dan 4 Kegiatan	300.000.000	10 Dokumen dan 5 Kegiatan	300.000.000	15 Dokumen dan 8 Kegiatan	250.000.000	21 dokumen dan 12 kegiatan	300.000.000	27 dokume n dan 15 kegiatan	300.000.000	27 dokume n dan 15 kegiatar	343.577.329,-
1.03.12.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota														



1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan forum penataan ruang	1 Dokumer	6 Dokumen dan 4 Kegiatan	2.000.000.000	10 Dokumen dan 5 Kegiatan	2.000.000.000	15 Dokumen dan 8 Kegiatan	2.000.000.000	21 dokumen dan 12 kegiatan	2.000.000.0 00	27 dokume n dan 19 kegiatan	2.000.000.000	27 dokume n dan 15 kegiatar	730.118.390, 00
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumer	1 dokumen	50.000.000	2 dokumen	70.000.000	3 dokumen	85.000.000	4 dokumen	95.000.000	5 dokume n	110.000.000,0	5 Dokume n	493.636.791, 00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang														
1 02 12 2 02 01	Daerah Kabupaten/Kota			41		<u> </u>				71				0	1 225 165 00
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	1 Dokumer	4 kegiatan	500.000.000	5 kegiatan	400.000.000	6 kegiatan	500.000.000	7 kegiatan	400.000.000	8 : kegiatan	400.000.000	8 kegiatar	1.325.165.09 5,00



1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalia Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota													
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100%	1 Dokumen	74.954.200	1 Dokumen	82.449.620	1 Dokumen	90.694.582	1 Dokumen	99.764.040	1 Dokume n	109.740.444 Dok	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI													
2.10.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah													



	Kabupaten/Kota														
2.10.02.2.01.01	Koordinasi dan	Penerbitan	51 izin	7 izin lokasi		18 Izin		25 izin		32 Izin		39 izin		39 izin	
	Sinkronisasi Pemberian	Dokumen	lokasi		250.000.000	Lokasi	250.000.000	lokasi	250.000.000	lokasi	300.000.000	lokasi	300.000.000	lokasi	00
	Izin Lokasi dalam Rangka	Penyelesaian Izin													
	Penanaman Modal dan	Lokasi,													
	Kemudahan Berusaha	Penyelesaian Izin													
		Lokasi Baru,													
		Penyelesaian Izin													
		Lokasi													
		Perpanjangan													
2.10.04	PROGRAM														
	PENYELESAIAN														
	SENGKETA TANAH														
	GARAPAN														
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa														
	Tanah Garapan dalam														
	Daerah Kabupaten/Kota.														
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian	Rekapitulasi dan	10 kasus	5 kasus		5 kasus		5 kasus		5 kasus		5 kasus		5 kasus	
	Sengketa Tanah Garapan	Dokumentasi			100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		00
	dalam 1 (Satu) Daerah	penyelesaian													



	Kabupaten/Kota.	sengketa													
		Pertanahan Pemkab													
		Sintang													
2.10.05	PROGRAM														
	PENYELESAIAN GANTI														
	KERUGIAN DAN														
	SANTUNAN TANAH														
	UNTUK PEMBANGUNAN														
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah														
	Ganti Kerugian dan														
	Santunan Tanah untuk														
	Pembangunan oleh														
	Pemerintah Daerah														
	Kabupaten/Kota														
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi	Terlaksananya	2.622 m2	142.961 m2		142.961		142.961 m2		142.961 m2		142.961		142.961	
	Penyelesaian Masalah Ganti	pengadaan ganti			12.952.978.070	m2	12.952.978.07		12.952.978.070		12.952.978.	m2	12.952.978.07	m2	5,00
	Kerugian dan Santunan	rugi tanah untuk					0				070		0		
	Tanah untuk Pembangunan	pembangunan													
	oleh Pemerintah Daerah														
	Kabupaten/Kota														



2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH														
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah														
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	tersedianya lahan untuk izin membuka tanah	26.720 m2	30.000 m2	200.000.000	40.000 m2	150.000.000	50.000 m2	200.000.000	60.000 m2	200.000.000	70.000 m2	200.000.000	250.000 m2	53.503.450,00
2.10.10	PROGRAM														
2.10.10.2.01	PENATAGUNAAN TANAH Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah														
2.10.10.2.01.01		Terdatanya	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Perencanaan Penggunaan Tanah	Pengendalian Pememfaatan tanah Negara dari Kawasan Hutan			250.000.000		275.000.000		302.500.000		133.100.000		279.510.000		1.240.110.000, 00



		Kawasan Non Produktif													
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemasangan tanda batas aset pemkab sintang	100%	Jumlah patok batas tanah yang dipasang = 120 Patok	96.235.000	Jumlah patok batas tanah yang dipasang = 120 Patok	95.994.000	Jumlah patok batas tanah yang dipasang = 224 Patok		Jumlah patok batas tanah yang dipasang = 224 Patok	164.310.392	Jumlah patok batas tanah yang dipasan g = 2224 Patok		95,94%	337.525.800, 00
02:10:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
02.10.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	ı	12 BULAN	3.460.166.042	12 BULAN	3.500.000.000	12 BULAN	3.550.000.000	12 BULAN	3.600.000.0 00	12 BULAN	3.650.000.000		17.760.166.042



02.10.01.2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan	Terlaksananya	-	12 BULAN		12 BULAN		12 BULAN		12 BULAN		12			
.04	Akutansi SKPD	penyusunan			1.460.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	BULAN	1.500.000		7.460.000
		akutansi dan													
		pelaporan													
		keuangan													
02.10.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan	Terlaksananya	-	12 BULAN		12 BULAN		12 BULAN		12 BULAN		12			
.05	Laporan Keuangan Akhir	koordinasi dan			8.123.170		8.200.000		8.300.000		8.500.000	BULAN	8.700.000		41.823.170
	Tahun SKPD	penyusunan laporar													
		keuangan akhir													
		tahun skpd													
02.10.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan	Terlaksananya	100%	Jumlah	7.489.900	Jumlah	9.468.425	Jumlah	10.734.500	Jumlah	10.000.000	Jumlah	10.000.000	100%	24.790.632
.07	Laporan Keuangan Bulanan	Koordinasi dan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan			
	/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan		Tahunan =		Tahunan		Tahunan =		Tahunan =		Tahunan			
		Laporan Keuangan		6 dokumen		= 6		6 dokumen		6 dokumen		= 6			
		Bulanan				dokumen						dokume			
		/Triwulan/Semester										n			
		an SKPD													
2 10 01 2 01															
2.10.01.2.01															
	Penganggaran, dan Evaluasi														
	Kinerja Perangkat Daerah														



02.10.01.2.01	Koordinasi Dan Penyusunan	Terlaksananya	-	12 BULAN		12 BULAN		12 BULAN		12 BULAN		12			
.06	Laporan Capaian Kinerja	Koordinasi Dan			10.127.700		12.000.000		13.000.000		14.000.000	BULAN	15.000.000		64.127.700
	Dan Ikhtisar Realisasi	Penyusunan													
	Kinerja SKPD	Laporan Capaian													
		Kinerja Dan Ikhtisar													
		Realisasi Kerja													
2.10.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan														
	Kapasitas Sumber Daya														
	Aparatur														
02.10.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya	-	4 orang	100.000.000	8 orang	100.000.000	12 orang	100.000.000	16 orang	100.000.000	20	100.000.000	20	500.000.000
.09	Formal	Pendidikan dan										orang		orang	
		Pelatihan Formal													
2.10.01.2.06	Administrasi Umum														
	Perangkat Daerah														
02.10.01.2.06	Penyediaan Komponen	Teersedianya	-	12 BULAN	4.992.460	12 BULAN	5.500.000	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	6.500.000	12	7.000.000		29.992.460
.01	Instalasi Listrik/Penerangan	kebutuhan										BULAN			
	Bangunan Kantor	peralatan listirk													
02.10.01.2.06	Penyedian Peralatan Dan	Tersedianya	-	12 BULAN	527.770.600	12 BULAN		12 BULAN		12 BULAN	45.000.000	12	50.000.000		1.187.770.600
.02	Perlengkapan Kantor	Kebutuhan					415.000.000		150.000.000			BULAN			



		Peralatan Dan												
		Perlengkapan												
		Kantor												
02.10.01.2.06	Penyediaan Peralatan	Tersedianya	-	12 BULAN	6.597.690	12 BULAN	7.500.000	12 BULAN	8.000.000	12 BULAN	8.500.000	12	9.000.000	39.597.690
.03	Rumah Tangga	Peralatan Rumah										BULAN		
		Tangga												
02.10.01.2.06	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya Bahan	-	12 BULAN	44.786.932	12 BULAN	46.000.000	12 BULAN	48.000.000	12 BULAN	50.000.000	12	52.000.000	240.786.932
.04	Kantor	Logistik Kantor										BULAN		
02.10.01.2.06	Penyediaan Barang Cetakan	Tersedianya Barang	-	12 BULAN	9.988.000	12 BULAN	10.500.000	12 BULAN	11.000.000	12 BULAN		12	12.000.000	54.988.000
.05	Dan Penggandaan	Cetak Dan Foto									11.500.000	BULAN		
		Сору												
02.10.01.2.06	Penyediaan Bahan Bacaan	Tersedianya Buku-	-	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	6.000.000	12	6.000.000	30.000.000
.06	Dan Perundang-Undangan	Buku										BULAN		
		Peraturan												
		Perundangan												
		Dan Terbayarnya												
		Abonemen Surat												
		Kabar												
02.10.01.2.06	Penyelenggaraan Rapat	Terlaksananya	100%	32 kali	213.650.000	32 kali	261.860.000	10 kali	251.860.000	10 kali	270.000.000	10 kali	280.000.000	699.014.614
.09	Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan		keluar		keluar		keluar		keluar		keluar		
	SKPD	Rapat Koordinasi		kabupaten		kabupaten		kabupaten		kabupaten		kabupat		
		dan Konsultasi		dan 11 kali		dan 11		dan 3 kali		dan 4 kali		en dan 4	4	
		SKPD		keluar		kali keluar		keluar		keluar		kali		



				provinsi		provinsi		provinsi		provinsi		keluar		
												provinsi		
2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik													
	Daerah Penunjang													
	Urusan Pemerintah													
	daerah													
02.10.01.2.07	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja,	-	12 BULAN	7.480.000	12 BULAN	160.000.000	12 BULAN	10.500.000	12 BULAN	11.000.000	12	12.000.000	200.980.000
.05		Kursi, Lemari										BULAN		
		Kantor												
02.10.01.2.07	Pengadaan Sarana Dan	Tersedianya Sarana	-	12 BULAN	86.000.000	12 BULAN	86.000.000	12 BULAN	86.000.000	12 BULAN	86.000.000	12	86.000.000	430.000.000
.10	Prasarana Gedung Kantor	Dan Prasarana										BULAN		
	Atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor												
2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa													
	Penunjang Urusan													
	Pemerintah daerah													
02.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat	Tersedianya benda-	-	12 BULAN	2.000.000	12 BULAN	2.000.000	12 BULAN	2.000.000	12 BULAN	2.000.000	12	2.000.000	10.000.000
.01	Menyurat	benda pos (Materai										BULAN		
		dan												
		Perangko)												



02.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi	Terbayarnya	-	12 BULAN	88.000.000	12 BULAN	90.000.000	12 BULAN	95.000.000	12 BULAN	95.000.000	12	100.000.000		468.000.000
.02	Sumber Daya Air Dan Listrik	Abonemen Telp, Air Dan Listrik										BULAN			
02.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Peralatan	Terbayarnya Honor	-	12 BULAN	4.994.000	12 BULAN	5.500.000	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	6.500.000	12			29.994.000
.03	Dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pelengkap Kebutuhan										BULAN	7.000.000		
		Peralatan Dan													
		Perlengkapan Kantor													
02.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan	Tersedianya Jasa	-	12 BULAN	388.208.400	12 BULAN	388.208.400	12 BULAN	388.208.400	12 BULAN	388.208.400	12	388.208.400		1.941.042.000
.04	Umum Kantor	Pelayanan Umum										BULAN			
		Kantor													
2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang														
	Milik Daerah Penunjang														
	Urusan Pemerintah daerah														
02.10.01.2.09	Penyediaan Jasa	Terbayarnya Biaya	-	1 Unit Mobil	21.774.600	1 Unit	30.000.000	1 Unit Mobi	30.000.000	1 Unit Mobil	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 unit	141.774.600
.01	Pemeliharaan Biaya	Pemeliharaan Dan				Mobil						Mobil		mobil	
	Pemeliharaan Dan Pajak	Pajak Kendaraan													
	Kendaraan Dinas/Kendaraan	Dinas/Kendaraan													
	Dinas Jabatan	Dinas Jabatan													



02.10.01.2.09	Penyediaan Jasa	Terbayarnya Biaya	-	1 unit mobil	10.955.600	1 unit		1 unit mobil		1 unit mobil		1 unit		1 unit	70.955.600
.02	Pemeliharaan Biaya	Pemeliharaan Dan		16 unit		mobil 16	15.000.000	16 unit	15.000.000	16 unit	15.000.000	mobil 16	15.000.000,00	mobil	
	Pemeliharaan Dan Pajak	Pajak Perizinan		motor		unit motor		motor		motor		unit		16 unit	
	Perizinan Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas										motor		motor	
	Operasional/Lapangan	Operasional/Lapang													
		an													



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2021. Keberadaan Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan arah dari suatu rangkaian perencanaan yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya visi Bupati Sintang, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021".

Renja sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan penting

- Bahwa dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja, seluruh aparatur Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang wajib mempedomani ketentuan perundangan yang berlaku;
- > Bahwa apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, maka kegiatan tetap dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran dengan memperhatikan skala prioritas.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan



- Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021 serta diselaraskan dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2021;
- ➤ Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2021;
- ➤ Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021, pimpinan secara berjenjang wajib melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pencapaian program dan kegiatan secara berkesinambungan.

c. Rencana tindak lanjut

- Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 sangat tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan;
- ➤ Pelaksanaan Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021 diharapkan juga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana selanjutnya oleh pimpinan, sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.



Rencana kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021 berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Akhirnya, semoga keberadaan Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2021 dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sintang.

Sintang, Mei 2020 KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,

> Henri, S.Sos., M.M Pembina Utama Muda NIP. 19610818 198203 1 014